



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : LLDIKTI WILAYAH XIII

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYAFI' M AMIN
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 511972

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 939.900.000

1. Tanah Seluas 931 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
2. Tanah Seluas 988.4 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 177.500.000
4. Tanah Seluas 468 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 608.400.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 9.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.017.527**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 960.917.527

**III. HUTANG** Rp. 177.294.101

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 783.623.426

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.